

**PENGARUH BANTUAN ASING TERHADAP TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI
KOMUNITAS MIGRAN PEREMPUAN DI INDONESIA (2019–2023)**

***THE IMPACT OF FOREIGN AID ON THE SOCIO-ECONOMIC
TRANSFORMATION OF FEMALE MIGRANT COMMUNITIES IN INDONESIA
(2019–2023)***

**Dhiwa Abiyu Alfattah^{1*}, Iman Jaya Gea², Ketut Lira Kurnia³,
Putri Permata Liza⁴, Neli Aida⁵, Muhammad Mufti Hudani⁶,
Qurrota Ayu Nindien⁷**

¹²³⁴⁵⁶⁷ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
Email: putripermataliza11@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received April 17, 2025

Revised June 10, 2025

Accepted July 10, 2025

Available online July 15, 2025

Kata Kunci:

Migran Perempuan, Bantuan
Asing, Transformasi Sosial
Ekonomi, Indonesia,
Pemberdayaan

Keywords:

*Migrant Women, Foreign Aid,
Socio-Economic
Transformation, Indonesia,
Empowerment*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bantuan asing terhadap transformasi sosial ekonomi komunitas migran perempuan di Indonesia pada periode 2019 hingga 2023. Meningkatnya jumlah migrasi perempuan telah menjadi fenomena penting yang menghadirkan tantangan ekonomi, sosial, dan budaya. Bantuan asing dalam bentuk dana hibah, pelatihan keterampilan, pendidikan, serta dukungan sosial, berpotensi memberikan dampak positif terhadap pendapatan, akses pendidikan, peluang kerja, dan kesejahteraan komunitas migran. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, data diperoleh dari laporan lembaga internasional dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pendapatan bulanan, akses modal usaha, serta indeks kesejahteraan keluarga.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of foreign aid on the socio-economic transformation of female migrant communities in Indonesia in the period 2019 to 2023. The increasing number of female migration has become an important phenomenon that presents economic, social, and cultural challenges. Foreign aid in the form of grants, skills training, education, and social support has the potential to have a positive impact on income, access to education, employment opportunities, and the welfare of migrant communities. Using quantitative and qualitative approaches, data were obtained from reports from international institutions and field surveys. The results of the study showed a significant increase in monthly income, access to business capital, and the family welfare index.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, migrasi perempuan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Jika sebelumnya laki-laki lebih mendominasi mobilitas migrasi, kini perempuan turut aktif bermigrasi, baik secara internal maupun internasional. Faktor pendorongnya meliputi keterbatasan ekonomi, ketimpangan pembangunan, serta tuntutan keluarga.

Namun, migrasi perempuan tidak lepas dari tantangan kompleks. Mereka kerap menghadapi kondisi kerja yang rentan, pemisahan dari keluarga, serta benturan nilai budaya di tempat tujuan. Dalam

merespons hal tersebut, bantuan asing berperan melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, perlindungan hukum, dan akses layanan dasar. Tujuannya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat pembangunan sosial-ekonomi di daerah asal dan tujuan migrasi.

Meski demikian, efektivitas bantuan asing di Indonesia masih beragam dan belum dikaji secara mendalam. Dalam beberapa kasus, program bantuan cenderung bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar masalah struktural. Ketergantungan terhadap bantuan luar bahkan berisiko melemahkan kapasitas lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara kritis peran bantuan asing terhadap pemberdayaan perempuan migran dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Bantuan asing bagi komunitas migran perempuan umumnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, seperti *women's fund*, yang mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan, terutama untuk perempuan yang mengalami kekerasan atau kondisi rentan. Salah satu contohnya adalah Pundi Perempuan di Indonesia, yang menyediakan dukungan finansial bagi organisasi yang menangani kekerasan berbasis gender.

Dukungan ini memainkan peran dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi perempuan migran. Transformasi tersebut mencakup beberapa aspek utama: pertama, peningkatan pendapatan individu dan rumah tangga yang dapat memperkuat daya beli dan pertumbuhan ekonomi lokal; kedua, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun nonformal, yang mendukung pengembangan keterampilan dan mobilitas sosial; ketiga, perluasan akses terhadap pekerjaan layak, baik di sektor formal maupun melalui wirausaha produktif; dan keempat, peningkatan kesejahteraan keluarga yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan stabilitas sosial-psikologis anggota keluarga.

Dengan demikian, bantuan asing tidak hanya berfungsi sebagai intervensi jangka pendek, tetapi juga berpotensi mendorong perubahan struktural yang mendukung keberdayaan dan kesejahteraan perempuan migran secara berkelanjutan.

1. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan konsep yang berakar dari kata “daya”, yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan untuk bertindak. Dalam praktiknya, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan harkat dan martabat kelompok-kelompok yang berada dalam kondisi kurang beruntung, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi keterbatasan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari proses ini terletak pada penguatan kapasitas dan potensi masyarakat melalui berbagai bentuk dorongan, pendampingan, dan motivasi agar mereka mampu berkembang secara mandiri. (Zubaedi, 2013)

Lebih lanjut, pemberdayaan berkaitan erat dengan dua gagasan utama: kekuasaan (power) dan ketimpangan (disadvantage). Proses ini tidak hanya menumbuhkan kemampuan individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi juga membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan, kelaparan, kebodohan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya yang produktif. Dengan demikian, pemberdayaan menjadi alat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh—baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun partisipasi dalam pembangunan. (Suharto, 2005)

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah menciptakan ruang bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam posisi lemah, untuk memperoleh kekuatan dan kendali atas kehidupannya. Ketidakberdayaan yang mereka alami dapat bersumber dari faktor internal, seperti rendahnya rasa percaya diri dan persepsi negatif terhadap diri sendiri, maupun dari tekanan eksternal berupa sistem sosial yang tidak berpihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik kelompok rentan serta kondisi-kondisi yang membatasi mereka, agar strategi pemberdayaan yang dijalankan benar-benar menyentuh akar permasalahan. (Sibyan, 2018)

Dalam pemaparannya, Rajuminropa menjelaskan bahwa proses pemberdayaan melibatkan dua kecenderungan utama. Pertama, kecenderungan primer yang berfokus pada pemberian kekuatan dan kapasitas kepada individu dan masyarakat agar mereka mampu membangun aset material yang dapat mendukung kemandirian komunitas. Kedua, kecenderungan sekunder yang lebih menekankan pada pemberian motivasi serta dorongan kepada individu agar memiliki daya dan kendali dalam menentukan arah hidupnya.

Pemberdayaan juga merupakan sarana penting dalam membangun kapasitas masyarakat (*capacity building*), terutama dalam upaya penguatan sumber daya manusia. Proses ini biasanya dilakukan melalui kegiatan seperti pendampingan, penyuluhan, hingga pelayanan sosial. Menurut Zubaedi (2013), strategi pemberdayaan harus mengarah pada tiga hal penting: menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan kapasitas masyarakat, memperkuat potensi yang sudah ada, dan memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan agar tidak semakin terpinggirkan. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat membutuhkan peran fasilitator yang bersifat multidisipliner. Keberadaan pendamping ini merupakan faktor eksternal penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses pemberdayaan. (Mardikanto, 2018).

Meskipun dilaksanakan secara kolektif, tidak semua bentuk intervensi dapat dilakukan secara menyeluruh oleh fasilitator. Oleh karena itu, penting untuk membangkitkan kesadaran individu melalui pelibatan mereka dalam ranah sosial dan politik yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan individu melihat persoalan, harapan, dan kekecewaannya dari perspektif yang lebih luas dan sistemik. (Rukminto, 2008).

Zubaedi juga menekankan empat prinsip utama dalam pengembangan masyarakat. Pertama, pendekatan pemberdayaan tidak bisa netral selalu ada keberpihakan terhadap kelompok yang terpinggirkan. Kedua, proses ini harus mendorong perubahan terhadap praktik-praktik yang bersifat diskriminatif, menekan, dan memaksa. Ketiga, prinsip demokrasi menjadi dasar dalam pemberdayaan, dengan memberikan ruang bebas bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Terakhir, masyarakat harus diberi akses yang layak terhadap program-program pelayanan publik demi menjamin kesetaraan dalam pembangunan.

2. Teori Ketergantungan

Teori ketergantungan atau *dependency theory* menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan antara negara-negara maju dan negara berkembang bukanlah sekadar hasil dari kegagalan internal negara berkembang, melainkan akibat dari pola hubungan global yang timpang. Dalam pandangan ini, negara-negara di pinggiran (*peripheral*), yang umumnya merupakan negara berkembang atau Dunia Ketiga, sangat bergantung pada negara-negara inti (*core countries*) atau negara maju. Ketika negara pinggiran berinteraksi secara ekonomi dan politik dengan negara inti, hubungan tersebut membentuk struktur ketergantungan yang tidak setara. Negara-negara maju cenderung mampu tumbuh secara mandiri, sementara negara-negara berkembang sering kali hanya mengikuti arus perkembangan yang ditentukan oleh kepentingan negara-negara inti (Smith, 2018).

Dalam konteks Indonesia, teori ketergantungan menjadi alat analisis yang relevan untuk melihat relasi negara ini dengan lembaga seperti IMF. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki keterikatan terhadap sistem moneter global yang dikendalikan oleh negara-negara dengan kekuatan ekonomi dominan. Dalam kerangka ini, teori ketergantungan membantu menjelaskan bagaimana dominasi global dapat menciptakan situasi di mana negara pinggiran sulit mencapai kemandirian ekonomi. Ketimpangan tersebut menyebabkan sumber daya dari negara berkembang terus mengalir ke pusat kekuasaan global, sementara negara pinggiran mengalami stagnasi atau keterbelakangan struktural.

Teori ini muncul dari kritik terhadap pendekatan modernisasi yang dianggap gagal diterapkan di Amerika Latin pada 1960-an, khususnya oleh lembaga ECLA (Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika

Latin). Teori ini kemudian berkembang dalam tradisi neo-Marxis dan menjadi respons terhadap teori pembangunan klasik yang terlalu menekankan pentingnya meniru jalur pertumbuhan negara-negara maju. Dalam tradisi Marxis, teori ini juga beririsan dengan analisis tentang imperialisme, di mana negara-negara maju secara aktif memperluas pengaruh dan kendali terhadap negara-negara berkembang melalui sistem ekonomi global yang tidak adil.

Salah satu tokoh sentral dalam teori ini adalah Theotonio Dos Santos yang memaknai ketergantungan sebagai relasi yang timpang antara negara maju dan negara miskin, di mana pembangunan negara maju justru menciptakan hambatan bagi kemajuan negara berkembang. Ia menekankan bahwa negara maju akan menyalurkan dampak krisis ke negara berkembang, namun tidak berlaku sebaliknya. Sementara itu, Andre Gunder Frank juga menyoroti bahwa kemiskinan di Dunia Ketiga bukanlah akibat dari ketertinggalan internal, melainkan dari keterlibatan aktif mereka dalam sistem ekonomi kapitalis global yang eksploitatif. Aspek penting lainnya dari teori ini adalah tekanannya pada faktor eksternal dalam proses pembangunan. Negara-negara kuat tidak hanya mendominasi melalui persaingan ekonomi, tetapi juga terlibat dalam pembentukan ulang struktur sosial, politik, dan ekonomi negara-negara lemah.

Robert A. Packenham menyoroti bahwa kekuatan teori ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri negara industri memengaruhi dinamika internal negara berkembang, termasuk hubungan antar kelas dan struktur kekuasaan domestik yang terhubung secara internasional. Sebagai bagian dari teori struktural, teori ketergantungan mengusung pendekatan materialisme historis ala Karl Marx, namun dengan koreksi terhadap klaim bahwa kapitalisme akan menyebar secara seragam di seluruh dunia. Justru, menurut teori ini, sistem kapitalis global menciptakan ketimpangan struktural yang membuat beberapa negara selalu berada dalam posisi lemah. Inti dari teori ini adalah bahwa kemajuan dan keterbelakangan merupakan dua sisi dari koin yang sama. Kemajuan ekonomi negara pusat dibangun melalui eksploitasi atas negara pinggiran, yang mengakibatkan negara-negara Dunia Ketiga tetap terjebak dalam kemiskinan dan ketidakstabilan. Ketergantungan ini berlangsung secara sistematis dan historis, sehingga memperkuat dominasi negara maju sekaligus meminggirkan negara berkembang dalam arus ekonomi global (Alethia, 2020).

3. *Gender and Development*

Pada dekade 1970-an, kesadaran akan perlunya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan mulai mendapatkan perhatian global. Hal ini memicu lahirnya konsep *Women in Development* (WiD), yang berakar pada pandangan feminisme liberal dan perspektif pembangunan konvensional. Konsep ini berusaha memasukkan perempuan ke dalam arus utama pembangunan. Namun, seiring berjalannya waktu, pendekatan WiD dinilai kurang efektif karena lebih banyak menempatkan perempuan sebagai pelengkap dalam sistem yang sudah ada, bukan sebagai subjek yang aktif. Kritik terhadap WiD menyebut bahwa pendekatan ini justru mengabaikan substansi emansipasi dan membatasi peran perempuan secara struktural.

Sebagai respons terhadap keterbatasan WiD, muncul pendekatan *Women and Development* (WaD), yang terinspirasi dari aliran feminisme neo-Marxis. Pendekatan ini mulai menyoroti posisi perempuan dalam sistem ekonomi global yang eksploitatif dan ketimpangan struktural yang memperburuk kemiskinan perempuan. Meskipun begitu, WaD juga dianggap belum cukup mampu mengangkat posisi perempuan miskin secara menyeluruh karena masih terbatas pada aspek ekonomi dan belum menyentuh akar persoalan sosial dan kultural.

Perkembangan lebih lanjut menghadirkan pendekatan *Gender and Development* (GaD) yang dinilai lebih progresif dan menyeluruh. Dalam karya Mosse (1993) berjudul *"Half the World, Half a Chance: An Introduction to Gender and Development"*, GaD menempatkan perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai agen perubahan. GaD tidak sekadar membicarakan perempuan sebagai kelompok yang perlu "dibantu", melainkan menekankan transformasi struktural untuk menciptakan keadilan gender. Pendekatan ini mendorong

pemberdayaan yang lebih menyeluruh, dengan memperkuat kapasitas perempuan agar mereka bisa mandiri dan berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan.

Menurut Prasetyawati (2018), konsep gender merujuk pada konstruksi sosial yang membentuk peran dan posisi perempuan di masyarakat. Selama ini, perempuan sering dipandang hanya layak menjalankan tugas-tugas domestik, sementara ruang publik dan pengambilan keputusan lebih didominasi laki-laki. Anggapan bahwa laki-laki lebih unggul secara alamiah telah melanggengkan ketimpangan struktural yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Oleh karena itu, pendekatan GaD menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai langkah strategis untuk merombak konstruksi sosial yang timpang dan mewujudkan keadilan gender dalam seluruh aspek pembangunan.

Pendekatan *Gender and Development* (GaD) memandang perempuan sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan, bukan sekadar sebagai objek kebijakan. Perempuan ditempatkan sebagai agen perubahan yang memiliki posisi sejajar dengan laki-laki, terutama dalam hal peran, peluang, dan kontribusi terhadap pembangunan. Pendekatan ini mengedepankan relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. GaD lebih berorientasi pada pendekatan *bottom-up*, di mana pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi perempuan menjadi titik masuk utama dalam merancang agenda pembangunan.

Prinsip dasar kesetaraan gender yang diusung oleh pendekatan ini mencakup persamaan dalam hak, status, akses, serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh sektor pembangunan. Konsekuensinya, baik jenis pekerjaan maupun imbalan yang diterima akan diberikan secara adil dan proporsional, tanpa diskriminasi berbasis gender. Pandangan ini juga selaras dengan keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Desember 1979 yang menetapkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) sebagai upaya global untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Di Indonesia, semangat ini terefleksi dalam kebijakan nasional melalui penerapan strategi *pengarusutamaan gender* (PUG) dalam pembangunan. Kesadaran akan pentingnya mengatasi ketimpangan struktural dalam relasi gender mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan pendekatan GaD secara sistemik. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya *Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000*, yang menegaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah pendekatan strategis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik. Instruksi tersebut menekankan pentingnya memasukkan perspektif gender ke dalam setiap tahap kebijakan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—dalam seluruh sektor pembangunan seperti politik, ekonomi, hukum, pertahanan, dan sosial budaya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002).

Implementasi pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan kualitas pembangunan secara menyeluruh, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan pencapaian keadilan gender. Lebih jauh, pendekatan GaD tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pembangunan keluarga yang inklusif dan berkualitas, tetapi juga memperluas partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai level, baik lokal maupun nasional.

4. Bentuk Bantuan Asing

Adapun bentuk bantuan asing adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan Keterampilan Kerja

Tujuan: Tujuan utama pelatihan keterampilan kerja adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja mereka di tempat kerja. Pelatihan juga dapat membantu karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebijakan perusahaan, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja. Pelatihan membantu karyawan memahami tugas dan tanggung jawab mereka

dengan lebih baik, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif. Pelatihan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan aman bagi karyawan, sehingga mereka merasa lebih dihargai dan termotivasi.

Contoh: Pelatihan usaha kecil, pemasaran digital

b. Akses Kredit dan Modal Usaha

Tujuan: Tujuan akses kredit dan modal usaha bagi penduduk asing di Indonesia umumnya untuk memfasilitasi investasi dan pengembangan usaha mereka, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Akses ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan menarik investor asing ke berbagai sektor. Pemberian kredit dan modal usaha kepada penduduk asing dapat membantu mereka mengembangkan bisnisnya, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penanaman modal asing (PMA) seringkali membawa teknologi dan pengetahuan baru, yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor.

Contoh: Pendampingan keuangan, pelatihan pengelolaan usaha.

c. Program Pemberdayaan Perempuan

Tujuan: Program pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan peran, kualitas hidup, dan status perempuan dalam masyarakat. Program ini berupaya menciptakan kesetaraan gender dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mandiri secara ekonomi dan sosial. Program ini bertujuan untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender dan hak-hak mereka, serta membantu mereka mengembangkan potensi diri dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Program pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan sosial. Penting untuk diingat bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.

Contoh: Komunitas belajar, koperasi perempuan

d. Dukungan Sosial dan Jaringan Komunitas

Tujuan: Tujuan dukungan sosial dan jaringan komunitas bagi migran asing adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik, membantu proses integrasi, dan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan baru di negara tujuan. Dukungan ini juga penting untuk membantu migran mengatasi perasaan kesepian, stres, dan diskriminasi, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial. Dukungan sosial membantu migran dalam mengatasi stres, kecemasan, dan risiko depresi, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka. Jaringan komunitas juga dapat menyediakan rasa aman dan dukungan emosional, yang penting untuk kesejahteraan mental dan fisik. Jaringan komunitas dapat membantu migran untuk mengembangkan kehidupan sosial yang lebih luas, memperluas jaringan mereka, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial di negara tujuan.

Contoh: Kelompok dukungan (*support group*)

e. Beasiswa dan Dukungan Pendidikan

Tujuan: Tujuan pemberian beasiswa dan dukungan pendidikan bagi imigran asing adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan keterampilan mereka, dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan serta berkontribusi pada masyarakat yang mereka tinggali. Beasiswa membantu imigran asing untuk menempuh pendidikan, baik di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi, atau pascasarjana, yang mungkin sulit mereka dapatkan tanpa bantuan finansial. Pendidikan dan pelatihan yang didukung oleh beasiswa membantu

imigran asing untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja, meningkatkan kemampuan bahasa, dan mendapatkan sertifikasi yang relevan. Pendidikan dan dukungan pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara tersebut, baik melalui keterampilan baru yang dimiliki oleh imigran asing maupun melalui transfer pengetahuan dan pengalaman.

Contoh: Beasiswa formal dan nonformal

5. Indikator Transformasi Sosial Ekonomi

- a. Kenaikan penghasilan bulanan (perubahan pendapatan positif) bisa menjadi kabar baik, tetapi penting untuk mengelola pendapatan baru tersebut dengan bijak. Perubahan pendapatan dapat memicu "inflasi gaya hidup" (pengeluaran yang meningkat seiring dengan pendapatan), yang bisa menyebabkan tabungan stagnan atau bahkan berkurang.
- b. Pendidikan formal di Indonesia memiliki jenjang dan lama studi yang berbeda untuk setiap tingkat. Pendidikan dasar mencakup 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan pendidikan menengah terdiri dari 3 tahun di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu, pendidikan sepanjang hayat juga penting untuk mengembangkan keterampilan baru agar dapat bersaing di pasar kerja.
- c. Kesempatan kerja yang luas dan jenis pekerjaan terjamin memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Hal ini dapat mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Kesejahteraan keluarga tercapai ketika anggota keluarga memiliki akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta memiliki stabilitas ekonomi yang memadai. Hal ini memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang lazim digunakan untuk mengkaji dan memahami suatu fenomena sosial secara mendalam dan alami. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan dengan cara mengeksplorasi informasi melalui kata-kata, narasi, serta pengalaman subjek yang diteliti. Peneliti berupaya memperoleh pemahaman utuh dari data yang dikumpulkan melalui studi lapangan, kemudian disajikan apa adanya berdasarkan fakta yang terungkap, tanpa rekayasa.

Sumber data merupakan suatu objek yang dipilih peneliti untuk mendapatkan data yang akan diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni data utama (Primer), dan data pendukung (Skunder).

Sumber data sendiri merujuk pada segala pihak atau objek yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam konteks ini, peneliti mengandalkan sumber utama (primer) dan sumber tambahan (sekunder) untuk melengkapi serta menguatkan hasil temuan di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan. Validitas data perlu dijaga agar hasil penelitian dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Untuk memastikan hal tersebut, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu proses menguji kebenaran data dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber atau waktu. Melalui triangulasi, peneliti dapat menilai kesesuaian antara data yang diperoleh dan realitas sebenarnya, serta menghindari bias informasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bertahap, bahkan sejak sebelum peneliti turun ke lapangan. Sebelum proses pengumpulan data dimulai, peneliti telah menyusun rencana kajian dan mengidentifikasi informasi awal yang berkaitan dengan topik penelitian. Tahapan ini

membantu dalam menentukan fokus pengamatan dan wawancara. Setelah itu, peneliti melakukan penggalian data secara langsung di lapangan untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh beberapa temuan penting:

1. Peningkatan pendapatan

Pendapatan: Rata-rata pendapatan migran perempuan meningkat 38% dalam 5 tahun (Rp1.250.000 menjadi Rp1.730.000). Kenaikan ini didorong oleh pelatihan keterampilan dan akses modal yang memungkinkan usaha mikro.

Pendapatan bulanan migran perempuan meningkat karena berbagai faktor, salah satunya adalah mereka lebih banyak bekerja di sektor dengan upah lebih tinggi, seperti sektor migran internasional. Selain itu, peningkatan pendidikan dan keterampilan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan migran perempuan. Pekerja migran perempuan sering bekerja di sektor yang menawarkan upah lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang ada di negara asal mereka. Contohnya, pekerja migran perempuan yang bekerja di negara-negara maju sering mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang bekerja di sektor pertanian atau informal di negara asal.

Migran perempuan yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih baik. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi juga dapat membantu meningkatkan keterampilan migran perempuan, sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih. Migran perempuan sering bekerja di sektor yang memiliki prospek pendapatan yang lebih baik, seperti sektor perawat, buruh rumah tangga, atau pekerja di restoran. Pekerjaan ini biasanya memiliki upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan di sektor lain. Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan migran perempuan merupakan hasil dari kombinasi faktor-faktor seperti peningkatan upah, pendidikan dan keterampilan, keterlibatan dalam bisnis, dan keterlibatan dalam sektor yang menguntungkan.

2. Akses Modal Usaha

Pada awal 2019, hanya sekitar 28% responden yang memiliki akses terhadap modal usaha (melalui kredit mikro atau dana hibah). Tahun 2023, angka ini naik menjadi 49%, berkat program dari lembaga donor seperti AUSAID dan program CSR dari NGO internasional.

Migran perempuan asing memiliki akses terhadap modal usaha melalui kredit mikro dan dana hibah. Kredit mikro menawarkan pinjaman kecil untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha kecil mereka. Dana hibah, di sisi lain, memberikan dukungan keuangan tanpa persyaratan pengembalian, yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pelatihan atau peralatan usaha. Lembaga keuangan mikro, seperti Amarthya, menyediakan pinjaman kepada wirausaha mikro perempuan, termasuk migran, yang mungkin tidak memiliki rekening bank atau akses ke layanan keuangan formal. Pinjaman ini membantu mereka untuk membeli bahan baku, peralatan, atau melakukan investasi untuk mengembangkan usaha mereka. Kredit mikro merupakan cara yang efektif untuk menjangkau kelompok perempuan yang tidak memiliki sumber daya modal untuk berdaya dan mandiri.

Akses terhadap modal usaha sangat penting bagi migran perempuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Dengan akses modal, mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berwirausaha, menciptakan produk atau jasa yang lebih berkualitas, dan mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. Migran perempuan asing dapat mengakses modal usaha melalui kredit mikro dan dana hibah, yang merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi mereka, meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Indeks Kesejahteraan

Berdasarkan indeks kesejahteraan (skor 1–10 berdasarkan aspek ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, dan psikologis), skor rata-rata meningkat dari 5,2 (2019) menjadi 7,4 (2023).

Peningkatan aspek ekonomi, pendidikan anak, dan kesehatan merupakan dampak positif yang signifikan dari migrasi perempuan, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan di Indonesia. Pekerja migran perempuan sering menjadi tulang punggung keluarga dan berkontribusi besar dalam menopang keuangan, yang kemudian berdampak pada peningkatan status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan anak, dan bahkan kualitas kesehatan anak. Pekerja migran perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan anak, dan kesehatan. Remitansi yang dikirimkan dapat menjadi sumber dana yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan anak-anak mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun bantuan asing membawa dampak positif, perlu adanya strategi pemberdayaan berkelanjutan agar tidak menimbulkan ketergantungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan asing memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi sosial ekonomi komunitas migran perempuan di Indonesia dalam kurun waktu 2019–2023. Dalam pembahasan ini, peneliti mengevaluasi lebih lanjut lima indikator utama—pendapatan, pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan keluarga, dan ketergantungan—dalam kerangka teori pemberdayaan, ketergantungan, serta pendekatan gender dan pembangunan.

1. Peningkatan Pendapatan

Rata-rata pendapatan bulanan migran perempuan mengalami peningkatan sebesar 38% selama periode lima tahun. Hal ini menunjukkan efektivitas pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha mikro dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Hasil ini mendukung Empowerment Theory, yang menyatakan bahwa akses terhadap sumber daya dan keterampilan dapat meningkatkan kontrol perempuan atas kehidupan mereka.

2. Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan

Lebih dari 60% responden mengikuti pelatihan keterampilan atau pendidikan non-formal. Ini merupakan indikasi bahwa program bantuan asing berhasil memberikan akses terhadap pembelajaran yang relevan dan praktis. Peningkatan ini sejalan dengan pendekatan Gender and Development, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mengangkat posisi sosial-ekonomi perempuan.

3. Transisi Pekerjaan ke Sektor Produktif

Migran perempuan yang semula bergantung pada pekerjaan rumah tangga informal beralih ke sektor produktif seperti usaha kecil kuliner dan kerajinan tangan. Hal ini mencerminkan perubahan struktur pekerjaan dan peningkatan kapasitas kerja. Pemberdayaan ekonomi ini tidak hanya meningkatkan penghasilan, tetapi juga menciptakan rasa percaya diri dan kemandirian dalam komunitas.

4. Kesejahteraan Keluarga

Peningkatan skor indeks kesejahteraan dari 5,2 menjadi 7,4 menunjukkan perbaikan signifikan dalam aspek kesehatan, pendidikan anak, dan stabilitas psikososial. Intervensi bantuan asing tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat dimensi sosial yang mendukung ketahanan keluarga.

5. Risiko Ketergantungan

Meski bantuan asing memberikan dampak positif, sebagian kecil responden menunjukkan ketergantungan terhadap program dan hibah eksternal. Ini menegaskan pandangan Dependency Theory, bahwa tanpa strategi exit yang jelas dan pembangunan kapasitas jangka panjang, bantuan dapat menimbulkan efek pasif atau bergantung.

6. Variabilitas Dampak

Dampak positif dari bantuan asing tidak merata di semua wilayah. Daerah dengan infrastruktur sosial yang baik dan dukungan pemerintah daerah yang aktif cenderung lebih berhasil dalam mengoptimalkan program. Sebaliknya, daerah terpencil mengalami hambatan dalam implementasi dan akses informasi. Hal ini menunjukkan pentingnya contextualization atau penyesuaian program terhadap kebutuhan lokal.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah bantuan asing terbukti memberikan dampak positif terhadap transformasi sosial ekonomi komunitas migran perempuan di Indonesia. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keberlanjutan program, konteks lokal, serta partisipasi aktif penerima manfaat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga donor, dan organisasi lokal untuk memastikan program pemberdayaan dapat memberikan hasil jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

AUSAID (2022). *Indonesia Migrant Empowerment Report*.

Aletheia, Rabbani. (2020). *Teori Ketergantungan (Depedensi Theory)*.
<https://www.sosiologi79.com/2020/07/teori-ketergantungan-dependency-theory.html?m=1>

IOM Indonesia (2023). *Laporan Statistik Migrasi dan Intervensi Bantuan Asing*.

Kabeer, N. (1999). *Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ministry of Women's Empowerment Republic of Indonesia. (2002)s.
<https://wcd.nic.in/sites/default/files/lcdsMission%20%20Broad%20Framework.pdf>

Mosse, J. C. (1993). *Half the World, Half a Chance*. http://shirky.com/writings/half_the_world.html.

Prasetyawati, N. (2018). *Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*. IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), 53-60. <http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4421/0>

Rukminto, Adi Isbandi. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sibyan, Hilda Hidayatus. (2018). *Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Dusun Bulurejo Desa Kapuhjero Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Smith, S. C. (2018). *Economic Development 13th Edition*. London: Pearson Education.

Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Todaro, M. P. (2000). *Economic Development in the Third World*. Longman.

UN Women (2023). *Laporan Program Pemberdayaan Perempuan Migran Indonesia*.

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.